



# MENGEMBANGKAN

**KETAHANAN PANGAN NASIONAL**

**MENUJU KEMANDIRIAN PANGAN**

*yang* **BERDAULAT BERBASIS**

*pada* **KEARIFAN LOKAL**

**Editor :**

Prof. Ir. Suwardji, M.App.Sc., Ph.D

Prof. Ir. Taslim Sjah, M.App.Sc., Ph.D

Ir. Zainuri, M.App.Sc., Ph.D

---

Judul : MENGEMBANGKAN KETAHANAN PANGAN  
NASIONAL MENUJU KEMANDIRIAN PANGAN  
YANG BERDAULAT BERBASIS PADA KEARIFAN  
LOKAL  
Editor : Prof. Ir. Suwardji, M.App.Sc., Ph.D., dkk.  
Layout : Sarkawi, SH., MH.  
Design sampul : Muhamad Azhar dan Lukman Hakim

**Penerbit:**

**Pustaka Bangsa**

Jln. Swakarsa VII Nomor 28 Kekalik Gerisak, Mataram-NTB

Telp. (0370) 629946 / Mobile Phone; +6281917431789

e-mail: [pustaka\\_bangsa@yahoo.com](mailto:pustaka_bangsa@yahoo.com)

website: [www.pustakabangsa.com](http://www.pustakabangsa.com)

**Cetakan Pertama,** 1 November 2016

Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
MENGEMBANGKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL MENUJU  
KEMANDIRIAN PANGAN YANG BERDAULAT BERBASIS PADA  
KEARIFAN LOKAL  
= Editor: Prof. Ir. Suwardji, M.App.Sc., Ph.D., dkk. =  
Pustaka Bangsa, 2016  
178 +xiv hlm. 15 cm x 23 cm  
**ISBN: 978-602-6822-17-8**

---

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak,  
sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun,  
tanpa izin penulis dan penerbit.

---

## DAFTAR ISI

---

	Halaman
HALAMAN SAMPUL -----	i
KATA PENGANTAR -----	v
DAFTAR ISI -----	vii
DAFTAR TABEL -----	xi
DAFTAR GAMBAR -----	xiii
BAB I. PENGANTAR -----	1
BAB II. MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN IN- PUT USAHATANI LOKAL UNTUK MEN- DUKUNG PENCAPAIAN KEDAULATAN PA- NGAN BERAS NASIONAL -----	21
A. Pendahuluan -----	21
B. Upaya Mencapai Swasembada Pangan Berkelanjutan -----	23
C. Input Usahatani -----	26
D. Usaha Tani Sehat -----	36
E. Penutup -----	40
F. Daftar Pustaka -----	41
BAB III. SUMBER PANGAN POKOK ALTERNATIF DI NUSA TENGGARA BARAT -----	45
A. Pendahuluan -----	45
B. Sumber Pangan Pokok Alternatif -----	47
C. Alternatif Sumber Pangan Pokok Se- lain Nasi Dari Beras Padi -----	48
1. Jagung .....	49
2. Pokem .....	50

3. Ubi Kayu atau Singkong.....	50
4. Ubi jalar .....	52
5. Kentang .....	53
6. Talas .....	54
7. Sagu.....	54
8. Pisang.....	55
9. Sukun.....	56
D. Perlu Gerakan Nasional-----	57
E. Beras Kreatif Plus sebagai Salah Satu Sumber Pangan Alternatif di NTB -----	59
1. Beras Kreatif <sup>-LGI</sup> .....	61
2. Beras Kreatif <sup>-forte</sup> .....	63
F. Teknologi Pengolahan Beras Dari Sumber Karbohidrat Lain-----	63
G. Penentuan Standar Kualitas Beras Kreatif+-----	67
H. Kesimpulan -----	67
I. Rekomendasi -----	67
J. Daftar Pustaka -----	68
 BAB IV. POTENSI DAN PELUANG PENGEM- BANGAN PANGAN LOKAL UNTUK MEN- DUKUNG KETAHANAN PANGAN-----	 73
A. Pendahuluan -----	73
B. Ketahanan Pangan Masyarakat NTB-----	75
C. Potensi Bahan Baku Lokal Untuk Mendukung Ketahanan dan Keman- dirian Pangan-----	76
D. Produk Pangan Lokal untuk Mendu- kung Ketahanan Pangan-----	82
E. Perbaikan Mutu Untuk Peningkatan Konsumsi Pangan Lokal -----	85
F. Penguatan Kapasitas Pelaku Usaha Pangan Lokal Untuk Meningkatkan Daya Saing Pangan Lokal-----	87
G. Kesimpulan dan Rekomendasi-----	88
H. Daftar Pustaka -----	89
 BAB V. POTENSI DAN PELUANG PEMANFAATAN SINGKONG SERTA INOVASI FERMENTASI	

A. Pendahuluan .....	93
B. Singkong dan Potensinya di Lombok Utara .....	94
C. Pemanfaatan Singkong di Kabupaten Lombok Utara .....	95
1. Pola Konsumsi Singkong di Beberapa Wilayah di Lombok Utara.....	95
2. Kondisi Produk Singkong Olahan Sederhana di KLU dan Kelemahannya.....	97
3. Fermentasi Singkong.....	98
4. Fermentasi Singkong dan Kelebihannya.....	99
5. Kelebihan Proses Fermentasi Singkong.....	99
6. Keunggulan Singkong dalam Bentuk Tepung Atau Sawut.....	105
D. Ketahanan pangan dengan membentuk <i>Link</i> Akar-Akar dan Sigar Penjalin -	109
E. Beberapa Hambatan Menuju Ketahanan dan Kemandirian .....	109
F. Kesimpulan .....	110
G. Rekomendasi .....	111
H. Daftar Pustaka .....	111

**B VI. MERAJUT KEARIFAN LOKAL UNTUK MENCAPAI KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA .....** 115

A. Pendahuluan .....	115
B. Ketahanan Pangan.....	117
C. Kearifan Lokal .....	120
D. Diversifikasi Pangan .....	122
E. Kisah Sukses Kearifan Lokal Desa Sigar Penjalin .....	124
1. Pengolahan Potensi Sumber Pangan Lokal.....	127
2. Pengalaman Bebaskan Balita dari Ancaman Kurang Gizi, Tanpa Beras..	128
3. Pelajaran Yang Bisa Diambil .....	129
F. Tantangan Diversifikasi Pangan Lokal--	131
G. Rekomendasi .....	132

H. Daftar Pustaka -----	133
<b>BAB VII. KEARIFAN LOKAL SEBAGAI BENTENG KETAHANAN PANGAN DI NUSA TENGGARA BARAT -----</b>	<b>135</b>
A. Pendahuluan -----	135
B. Kearifan Lokal dan Ketahanan Pangan-----	137
C. Best Practice Kearifan Lokal yang Mendukung Ketahanan Pangan di NTB -----	140
D. Tantangan dan Rekomendasi -----	142
E. Daftar Pustaka -----	143
<b>BAB VIII. PEMANFAATAN PANGAN LOKAL UNTUK GIZI MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK -----</b>	<b>145</b>
A. Pendahuluan -----	145
B. Masalah Gizi di Masyarakat di Indonesia dan Nusa Tenggara Barat -----	146
C. Pangan Lokal untuk Gizi Masyarakat yang Lebih Baik -----	15
D. Kesimpulan -----	16
E. Rekomendasi -----	16
F. Daftar Pustaka -----	16
<b>BAB IX. DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN-----</b>	<b>16</b>
A. Pendahuluan -----	16
B. Distribusi Pangan-----	16
C. Indikator Aksesibilitas Pangan -----	10
D. Stabilitas Harga Pangan -----	1
E. Kebijakan Akses Pangan-----	1
F. Kesimpulan dan Rekomendasi-----	1
1. Kesimpulan.....	1
2. Rekomendasi.....	1
G. Daftar Pustaka -----	1

## **BAB IX.**

# **DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN**

---

**Dr. Ir. Suparmin, MP dan**

**Ir. I.G. Lanang Parta Tanaya, M.App.Sc., Ph.D**

*Fakultas Pertanian Universitas Mataram*

*Jl. Majapahit 62 Mataram*

---

### **A. Pendahuluan**

Pangan merupakan kebutuhan yang sangat vital dan yang paling azasi di muka bumi ini, oleh sebab itu setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperolehnya. Ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan yang cukup baik dalam jumlah maupun mutunya sampai dengan tingkat rumah tangga dengan harga yang terjangkau secara berkelanjutan. Ketahanan pangan bukan saja merupakan dambaan bagi kita dalam perspektif daerah, tetapi juga merupakan dambaan bersama umat manusia di muka bumi ini karena dengan adanya ketahanan pangan merupakan salah satu pilar keamanan dunia ini.

Untuk itu merupakan tugas kita bersama atau seluruh komponen masyarakat termasuk pemerintah baik secara inter-nasional, nasional, regional, tingkat rumahtangga dan individu. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi sangat penting dan menentukan karena akan berpe-ngaruh kuat pada terciptanya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu.

Untuk menciptakan ketahanan pangan yang tangguh baik di tingkat nasional, regional, maupun rumah-tangga, maka ada tiga pilar yang harus diperkuat sebagai fondasi ketahanan pangan tersebut yaitu ketersediaan pangan, distribusi dan akses pangan, dan konsumsi pangan. Distribusi dan akses pangan sering dipandang sebagai kemampuan rumah tangga dalam memperoleh pangan dalam kondisi yang aman dengan harga yang terjangkau. Pilar kedua ini sebagai penyambung dari pilar ketersediaan dan konsumsi, karena pada pilar kedua inilah sebagai penentu tingkat ketahanan pangan rumah tangga.

Akses pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang dicerminkan dengan terpenuhinya pangan secara fisik, sosial, maupun ekonomi baik dalam lingkup wilayah maupun dalam lingkup rumah tangga. Jadi akses pangan ini dapat diartikan sebagai kemampuan rumah tangga baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial untuk mendapatkan pangan yang cukup secara tetap. Sumber pangan yang dapat diakses oleh masyarakat dapat diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari cadangan pangan sendiri, produksi rumah tangga, pembelian di pasar dan pinjam/bantuan pangan. Ketersediaan pangan di suatu daerah mungkin mencukupi, akan tetapi tidak semua rumah tangga memiliki akses yang memadai baik secara kuantitas maupun keragaman pangan melalui mekanisme tersebut.

## **B. Distribusi Pangan**

Produksi pangan yang dihasilkan oleh produsen (petani) kemudian menjadi ketersediaan pangan bagi masyarakat. Secara nasional pemerintah akan berupaya menyediakan pangan yang tercukupi bagi masyarakat secara keseluruhan. Kemudian yang menjadi persoalan adalah apakah ketersediaan pangan tersebut dapat didistribusikan secara penuh, aman, dan tercukupi bagi masyarakat. Maka untuk menjawab persoalan ini perlu dilakukan tata kelola distribusi dan akses pangan yang



dilaksanakan oleh pemerintah beserta lembaga terkait dan masyarakat.

Distribusi pangan ini akan tertuju kepada berbagai macam golongan masyarakat, baik itu dari golongan pendapatannya maupun dari suku, agama, dan tempat tinggal. Dilihat dari sisi golongan pendapatannya, maka ada masyarakat yang berpenghasilan tinggi, sedang dan rendah. Kepada ketiga golongan ini, pangan harus tersampaikan secara aman dan tercukupi agar supaya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga menjadi tahan pangan.

### C. Indikator Aksesibilitas Pangan

Indikator aksesibilitas/keterjangkauan dalam pengukuran ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dilihat dari kemudahan rumah tangga memperoleh pangan, yang diukur dari pemilikan lahan missal sawah dan ladang untuk suatu wilayah serta cara rumah tangga untuk memperoleh pangan. Akses yang diukur berdasarkan pemilikan lahan dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori yaitu:

1. Akses langsung (*direct access*), jika rumah tangga memiliki lahan sawah/ladang
2. Akses tidak langsung (*indirect access*) jika rumah tangga tidak memiliki lahan sawah/ladang.

Cara rumah tangga memperoleh pangan juga dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori yaitu: (a) produksi sendiri dan (b) membeli. Indikator aksesibilitas/ keterjangkauan rumah tangga terhadap pangan dikelompokkan dalam kategori seperti pada tabel berikut:

**Tabel 7.**

Penetapan indikator aksesibilitas/keterjangkauan pangan di tingkat rumah tangga

Pemilikan sawah/ladang	Cara rumah tangga memperoleh bahan pangan	
Punya	Akses langsung	Akses tidak langsung
Tidak punya	Akses tidak langsung	

Dari pengukuran indikator aksesibilitas ini kemudian diukur indikator stabilitas ketersediaan pangan yang merupakan penggabungan dari stabilitas ketersediaan pangan dan aksesibilitas terhadap pangan. Indikator stabilitas ketersediaan pangan ini menunjukkan suatu rumah tangga apakah:

- Mempunyai persediaan pangan cukup
- Konsumsi rumah tangga normal dan
- Mempunyai akses langsung terhadap pangan

Indikator kontinuitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 8.**

*Penetapan indikator kontinuitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga*

Akses terhadap pangan	Stabilitas ketersediaan pangan rumah tangga		
	Stabil	Kurang stabil	Tidak stabil
Akses langsung	Kontinyu	Kurang kontinyu	Tidakkontinyu
Akses tidak langsung	Kurang kontinyu	Tidak kontinyu	Tidak kontinyu

Indikator lain dalam akses masyarakat terhadap pangan ditentukan oleh akses fisik, akses ekonomi dan akses sosial. Dari ketiga aspek tersebut masing-masing dipengaruhi oleh faktor yang mendukung berjalan atau tidaknya setiap aspek dalam rangka menjamin akses pangan masyarakat.

#### 1. Akses fisik

Akses fisik menggambarkan tingkat ketersediaan pangan di suatu wilayah. Aspek ini dipengaruhi antara lain oleh produksi dan distribusi. Produksi dipengaruhi oleh jumlah produksi dan produktivitas untuk setiap jenis bahan pangan, sedangkan distribusi sangat dipengaruhi oleh tersedianya infrastruktur di suatu wilayah seperti ada atau tidaknya pasar, akses jalan/sungai, serta tersedianya modal transportasi.

#### 2. Akses Ekonomi.

Akses ekonomi menggambarkan kemampuan rumah tangga untuk mengakses pangan melalui daya beli.

Daya beli masyarakat dipengaruhi antara lain oleh pendapatan yang berasal dari hasil pekerjaan yang dilakukan pada berbagai mata pencaharian. Selain faktor pendapatan, faktor harga barang/*komoditas* juga menentukan daya beli masyarakat. Oleh karena itu kedua faktor ini menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan masyarakat. Upaya atau kebijakan umum yang diterapkan adalah stabilisasi harga pangan pokok agar mekanisme pasar dan distribusi yang ada dapat menyediakan pangan pokok dengan harga yang terjangkau serta memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat.

3. Akses sosial

Akses sosial menggambarkan pemenuhan kebutuhan pangan melalui aktivitas sosial. Akses sosial antara lain dipengaruhi oleh adanya bantuan sosial dan pendidikan. Bantuan sosial dapat berupa raskin, Bantuan Langsung Tunai (BLT) sampai dengan kegiatan padat karya. Upaya ini diiringi dengan pengentasan kemiskinan sehingga tujuan untuk menurunkan kelaparan dan kemiskinan 1 % pertahun dapat dicapai.

**D. Stabilitas Harga Pangan**

Stabilitas harga beras diukur berdasarkan perkembangan harga rata-rata data koefisien variasinya dan dimonitor terus menerus. Selama kurun tahun 2002 dan 2008 perkembangan harga gabah/beras di kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2007 yaitu harga GKP Rp 2.018,73,-/Kg, GKG Rp 2.050,93,-/kg dan harga beras rata-rata Rp.4.700,-/kg menunjukkan perkembangan fluktuasi harga masih relatif stabil.

Selama kurun tahun 2002 dan 2008 perkembangan harga nominal beras khususnya beras Ir-64 di Provinsi Nusa Tenggara Barat cenderung meningkat dari tahun ke tahun terutama dari tahun 2002 sampai 2008, namun disisi lain koefisien variasinya cenderung menurun pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan tingkat stabilitas harga beras semakin tinggi atau dengan

kata lain harga beras semakin stabil. Semakin stabilnya harga beras tersebut tidak terlepas dari peran beberapa kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga beras seperti kebijakan penetapan harga dasar, kebijakan stabilisasi pangan pokok, dan penyerdahanan tataniaga pangan.

**Tabel 9.**

*Perkembangan Harga Beras Ir-64 Rata-Rata dan Koefisien Variasi di Nusa Tenggara Barat Tahun 2002 - 2008*

Tahun	Standard Deviasi	Harga Rata-Rata (Rp/Kg)	Koefisien Variasi
2002	431.51	2788.50	0.15
2003	376.35	2539.92	0.15
2004	154.97	2374.42	0.07
2005	395.2	3058.25	0.13
2006	284.79	4221.92	0.07
2007	164.86	4753.50	0.03
2008	286.02	5202.33	0.05*)

Sumber: Data sekunder diolah

Keterangan: \*) harga beras sampai bulan Juni 2008

Stabilitas harga pangan akan menentukan daya beli masyarakat terhadap pangan. Sebagai gambaran untuk melihat daya beli masyarakat terhadap pangan, maka dapat dilihat dari indicator nilai tukar petani (NTP). Hal ini dapat dilakukan karena merujuk kepada keterwakilan masyarakat yang terbesar sebagai petani. Perkembangan NTP di Indonesia pada bulan Maret 2009, Nilai Tukar Petani Padi & Palawija (NTPP) tercatat sebesar 91,27, Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 105,32, Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 95,26, Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPPT) 108,97 dan Nilai Tukar Petani Nelayan (NTN) 95,19. Secara gabungan, Nilai Tukar Petani Provinsi NTB sebesar 96,58. Ini berarti

mengalami penurunan bila dibandingkan dengan bulan Februari yang terpaut sebesar 0,49 persen.

Dari 32 Provinsi yang dilaporkan pada Maret 2009, ada sebanyak 20 provinsi mengalami kenaikan, 12 provinsi mengalami penurunan. Kenaikan tertinggi NTP Maret 2009 terjadi di Provinsi Jambi yaitu sebesar 3,12 persen, karena indeks yang diterima naik hingga 3,13 persen, sedangkan penurunan NTP terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 1,13 persen, karena indeks yang diterima turun hingga 0,49 persen.

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga pedesaan di 7 Kabupaten di Provinsi NTB, NTP berfluktuasi setiap bulannya selama periode Januari 2008 - Maret 2009. Tinggi rendahnya NTP sangat dipengaruhi oleh gejolak harga. Oleh karena itu, pengendalian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi gejolak harga tersebut sangat diperlukan, apalagi mulai masuk awal tahun 2009 dari bulan Januari sampai dengan Maret NTP Provinsi NTB selalu di bawah 100 yang berarti petani mengalami defisit/penurunan daya belinya, karena kenaikan harga produksi relatif lebih Berita Resmi Statistik Provinsi NTB No.19/05/2 52/Th.III,1 Mei 2008 kecil atau bahkan menurun dibandingkan dengan kenaikan harga input produksi dan kebutuhan konsumsi rumah tangganya.

#### **E. Kebijakan Akses Pangan**

Setiap wilayah memiliki kemampuan yang berbeda dalam produksi dan penyediaan pangan, termasuk da-

lam hal mendatangkan pangan dari luar daerah. Di daerah yang terisolir, kelangkaan ketersediaan pangan sering kali menjadi penyebab utama rendahnya akses rumah tangga terhadap pangan. Dengan kondisi pembangunan yang semakin baik dan semakin terbukanya daerah yang terisolasi, kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan ditentukan oleh daya beli. Kemiskinan menjadi faktor pembatas utama dalam mengakses pangan. Setiap rumah tangga memiliki kemampuan yang berbeda dalam mencukupi kebutuhan pangan secara kuantitas maupun kualitas untuk memenuhi kecukupan gizi.

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk menjamin agar rumah tangga dan individu memiliki akses terhadap pangan yang tersedia. Upaya atau kebijakan umum yang diterapkan adalah stabilisasi harga pangan pokok agar mekanisme pasar dan distribusi yang ada dapat menyediakan pangan pokok dengan harga yang terjangkau serta memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat. Upaya ini diiringi dengan pengentasan kemiskinan sehingga tujuan yang dicanangkan pemerintah untuk menurunkan kelaparan dan kemiskinan dapat dicapai.

Kebijakan pengendalian harga memiliki dua tujuan seperti halnya yang diatur pada Inpres nomor 13 tahun 2005 dan kemudian diperbaharui dengan Inpres nomor 1 tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan. Pemerintah menerapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk memberikan harga produsen yang mencukupi kepada petani agar petani tidak menerima harga lebih rendah dibanding harga produksi. Gabah hasil pembelian petani digunakan untuk cadangan beras pemerintah dan program Raskin.

Disamping menerapkan kebijakan pengendalian harga beras, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan stabilisasi pangan pokok melalui Surat Menko Per-ekonomian nomor S-19/M.Ekon/02/2008 tanggal 1 Februari 2008. Kebutuhan pokok yang termasuk dalam

kebijakan ini adalah beras, minyak goreng, kedele, gula dan minyak tanah. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi dan merespon kondisi perekonomian global saat ini, terutama yang terkait dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, khususnya minyak dan pangan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi dampak gejolak atau stock kenaikan harga, menstabilkan harga dan pada gilirannya diharapkan dapat menurunkan harga. Instrumen kebijakan yang digunakan adalah instrumen fiskal, tata niaga dan kerjasama dengan dunia usaha. Secara operasional kebijakan dilaksanakan secara terpadu dan diarahkan untuk mengurangi biaya perdagangan melalui penyederhanaan tataniaga (arus keluar/masuk) komoditas pangan serta tidak mengenakan retribusi bagi komoditas pertanian yang keluar maupun masuk dari dan keluar baik di dalam provinsi maupun antar provinsi.

Untuk meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin, pemerintah telah mengembangkan program subsidi/bantuan pangan berupa beras untuk rumah tangga yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan. Mengingat beras adalah bahan pangan pokok yang paling banyak dikonsumsi, maka prioritas utama pemerintah adalah untuk menjamin masyarakat agar dapat mengakses beras dalam jumlah yang mencukupi melalui program subsidi pangan untuk rumah tangga miskin (Raskin). Melalui program ini pemerintah mendistribusikan beras dengan harga bersubsidi sehingga masyarakat miskin yang daya belinya sangat terbatas bisa mendapatkan bahan pangan pokok yaitu beras. Penyaluran Raskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2007 sebesar 55.809.794 kg dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 98.646.560 kg.

Instrumen kebijakan lain yang telah diterapkan untuk stabilisasi harga adalah cadangan pangan yang dimiliki pemerintah. Wujud nyata upaya peningkatan akses pangan masyarakat yang dituangkan dalam beberapa program seperti yang dilakukan di Provinsi NTE dengan pemberian penguatan modal Lembaga Usaha

Ekonomi Pedesaan (LUEP), pengembangan Lumbung Pangan Desa.

## F. Kesimpulan dan Rekomendasi

### 1. Kesimpulan

Dari seluruh uraian diatas secara umum keragaan proses distribusi dan akses pangan masyarakat Nus Tenggara Barat dapat dikategorikan baik. Hal ini ditunjukkan dengan tidak terjadinya tidak adanya daerah-daerah atau desa-desa yang mengalami kekurangan pangan. Penduduk di NTB sebagian besar mendapatkan akses pangan pokoknya melalui produksi sendiri walaupun secara netto petani produsen pangan bertindak sebagai net konsumen. Namun dengan kebijakan harga pangan yang diterapkan pemerintah saat ini maka harga pangan yang diterima masyarakat termasuk petani masih terjangkau daya beli mereka.

Dari segi ketersediaan pangan, di NTB jumlah pangan pokok khususnya beras masih tersedia dengan baik dari produksi sendiri, apalagi kalau dimasukkan produksi pangan bukan beras. Namun kebutuhan akan cadangan penyangga pangan jika terjadi kegagalan panen dalam jumlah yang besar tetap saja diperlukan agar tidak mengganggu keterjangkauan masyarakat paling tidak terhadap pangan pokok seperti beras.

Kalau dihitung berdasarkan Nilai Tukar Petani maka daya beli petani adalah menurun sebab nilai tukar petani dibawah 100 yang artinya kenaikan harga produksi petani per unit lebih rendah dibandingkan kenaikan harga input pertanian ditambah kenaikan harga kebutuhan pokok rumah tangga petani. Dengan demikian maka kebijakan yang dapat meringankan beban kebutuhan rumah tangga petani seperti raskin, BLU LUEP, Demapan masih sangat diperlukan untuk masyarakat tani di NTB.

### 2. Rekomendasi

Disarankan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang



bergerak dalam distribusi pangan agar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani secara seimbang dengan kepuasan konsumen pengguna. Strategi prioritas terbaik yang mungkin dapat dipilih adalah memperkuat kolaborasi (kerjasama) antara perusahaan distribusi pangan dengan petani, meningkatkan skala usaha petani melalui pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani agar dapat setara dengan perusahaan, serta meningkatkan kemampuan Gabungan Kelompok Tani agar memiliki akses langsung terhadap lembaga keuangan sebagai sumber penyediaan modal.

Sebaiknya Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Tata cara Kerjasama Antar Lembaga Dalam Distribusi Pangan dan Peraturan Gubernur atau Bupati tentang Petunjuk Teknis Operasional Kerjasama Antar Lembaga Dalam Distribusi pangan antara perusahaan dengan petani.

Perlu ada kebijakan perlindungan bagi petani agar tetap bergairah dalam memproduksi pangan dengan cara melakukan pembelian dengan harga layak untuk *excess-supply* pangan pada musim panen dan menjualnya diluar musim panen, sehingga harga produksi pangan di tingkat petani tidak merosot dan harga di tingkat konsumen tidak melampaui harga tertinggi yang mampu dibeli masyarakat.

#### G. Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik NTB.(2009). Nusa Tenggara Barat Dalam Angka. Badan Pusat Statistik NTB. Mataram.
- FAO. (1996). *World Food Summit*, 13-17 November 1996. Rome, Italy: Food and Agriculture Organisation of the United Nations.
- Pemerintah Provinsi NTB. (2009). Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi. Pemerintah Provinsi NTB. Mataram.
- Pusat Penelitian Kependudukan- LIPI.(1999). *Ketahanan Pangan Rumah tangga di Pedesaan: Konsep dan Ukuran*. Jakarta:Puslit Kependudukan-LIPI.